

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 22 Nomor 1, Januari 2017

ABU ACHMAD, RATNA SEPTIYANTI, MEGA METALIA

Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, *Intergovernmental Revenue*, dan Hasil Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

ERNA RUSVALITA, AGRIANTI KOMALASARI, FAJAR G. DEWI

Pengaruh Penerapan *Good Governance* Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Implementasi *Whistleblowing System* Sebagai Variabel Pemoderasi pada Direktorat Jenderal Pajak

LEGO WASPODO, KIAGUS ANDI

Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Perusahaan: Partisipasi Manajemen Puncak Sebagai Variabel Intervening

CHARA PRATAMI TIDESPANIA TUBARAD

Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah Dalam Menghitung Zakat Pada Perbankan Syariah

NUR PITRIANI DAN YENNI AGUSTINA

Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD Kota Bandar Lampung)

NINUK DEWI KESUMANINGRUM

Kemauan Membayar Pajak dan Faktor yang Memengaruhinya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Berlakunya PP No.46 Tahun 2013 di Bandar Lampung

APRI FAJAR, ADE WIDIYANTI

Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG

<http://fe-akuntansi.unila.ac.id/download/jak>

Jurnal Ilmiah Berkala Empat Bulanan ISSN 1410 – 1831

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 22 Nomor 1, Januari 2017

Penanggung Jawab:

Farichah

Ketua Penyunting:

Lindrianasari

Penyunting Pelaksana:

Rindu Rika Gamayuni

Penyunting Ahli/Mitra Bestari:

Zaki Baridwan

Universitas Gadjah Mada

Indra Wijaya

Universitas Gadjah Mada

Mahatma Kufepaksi

Universitas Lampung

Susi Sarumpaet

Universitas Lampung

Ratna Septiyanti

Universitas Lampung

Anggota Administrasi/Tata Usaha:

Suleman

Alamat Redaksi/Penerbit:

Redaksi Jurnal Akuntansi dan Keuangan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi

Universitas Lampung

Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1, Gedong Meneng

Bandar Lampung 35145

Telp. (0721) 705903, Fax. (0721) 705903

rindu.gamayuni@yahoo.com

Frekuensi terbit: enam bulanan

JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN

The Journal of Accounting and Finance

Volume 22 Nomor 1, Januari 2017

Daftar isi	i
ABU ACHMAD, RATNA SEPTIYANTI, MEGA METALIA Pengaruh Ukuran Pemerintahan Daerah, Intergovernmental Revenue, Dan Hasil Audit BPK Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	1 - 14
ERNA RUSVALITA, AGRIANTI KOMALASARI, FAJAR G. DEWI Pengaruh Penerapan <i>Good Governance</i> Terhadap Kinerja Organisasi Dengan Implementasi <i>Whistleblowing System</i> Sebagai Variabel Pemoderasi pada Direktorat Jenderal Pajak	15-32
LEGO WASPODO DAN KIAGUS ANDI Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kinerja Perusahaan: Partisipasi Manajemen Puncak Sebagai Variabel Intervening.....	33-48
CHARA PRATAMI TIDESPANIA TUBARAD Pendistribusian Laba Akuntansi Syariah Dalam Menghitung Zakat Pada Perbankan Syariah	49-66
NUR PITRIANI DAN YENNI AGUSTINA Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.....	67-76
NINUK DEWI KESUMANINGRUM Kemauan Membayar Pajak dan Faktor yang Memengaruhinya bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Setelah Berlakunya PP No.46 Tahun 2013 di Bandar Lampung	77-90
APRI FAJAR, ADE WIDIYANTI Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan Interim.....	91-106

PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG TERHADAP KINERJA APARATUR PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris SKPD Kota Bandar Lampung)

Nur Pitriani

Program Studi Akuntansi FEB Universitas Lampung

Email: pitriani_nur@yahoo.com

Yenni Agustina

Program Studi Akuntansi FEB Universitas Lampung

Email: yenni_shofa@yahoo.co.id

ABSTRACT

The aim of this study was finding empirical evidence about the effects of budgeting participation and authority delegation to local government officer performance in Bandarlampung. The sampling method in this study was purposive sampling with 74 respondents from 56 SKPD in Bandarlampung. The analysis method in this study used Structural Equation Model (SEM) SmartPLS 2.0 M3 software with variance basic. All data has been collected through quisionare. This study found that budgeting participation and authority delegation was significantly effect to local government officer performance. By Implementing the officer participation in budgeting there will motivate the local government officer to have responsibility toward their program success. Desentralization authority delegation will make every individual more responsible toward their job from their leader than without participation on budgetary setting, then every individual will increase their performance due to they have tried to achieve the organization objective.

Keyword : Budgeting Participation, Authority Delegation and Local Government Officer Performance.

A. PENDAHULUAN

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintahan. Alasan pemilihan dari kedua variabel independen ini yaitu yang pertama anggaran merupakan salah satu komponen terpenting dalam suatu organisasi, hal ini terbukti dengan banyaknya topik yang sering sekali diteliti oleh ilmuwan mengenai partisipasi anggaran, dan juga kaitan anggaran dengan kinerja. Hal ini dikarenakan anggaran merupakan salah satu media untuk menilai kinerja suatu organisasi salah satunya organisasi pemerintahan (Deddi, 2007). Pelaksanaan yang telah terwujud maka akan menjadi salah satu komponen dalam penilaian kinerja disektor pemerintahan, khususnya pemerintahan di kota Bandar Lampung. Kedua, Pelimpahan wewenang yang desentralisasi merupakan salah satu dasar yang harus ada dalam organisasi. Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000).

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada bagian BKD , bahwa didalam SKPD BKD terdapat pelimpahan wewenang dari kepala dinas kebagian keuangan yang sesuai

peraturan yang telah ditetapkan oleh kepala dinas maupun pemerintah kota Bandar Lampung, dalam pelimpahan wewenang terdapat motivasi terhadap karyawan berupa insentif dan tunjangan tetapi tidak untuk satu karyawan saja melainkan semua karyawan sehingga terdapat kesenjangan antar karyawan lain. Masalah yang terjadi di SKPD kota Bandar Lampung adalah ketidakpuasaan atau ketidaksesuaian pemberian imbalan, penghargaan dengan kebijakan pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kemalasan dalam bekerja dan ketidakcapaian target dalam instansi pemerintah daerah.

Fenomena yang terjadi di Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari masih lemahnya kinerja pemerintah tahun 2015 pada pencapaian kegiatan pembangunan, meskipun secara nyata kinerja yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung terlihat baik, akan tetapi dilihat dari perolehan pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2015 yang hanya tercapai 57,48%.

Dalam penganggaran dilakukan dengan system *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan/pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan/pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Penerapan system ini mengakibatkan kinerja bawahan/pelaksana anggaran menjadi tidak efektif karena target yang diberikan terlalu menuntut namun sumber daya yang diberikan tidak mencukupi (*overloaded*). Dalam proyeksi, atasan/pemegang kuasa anggaran kurang mengetahui potensi dan hambatan yang dimiliki oleh bawahan/pelaksana anggaran sehingga memberikan target yang menuntut dibandingkan dengan kemampuan bawahan/pelaksana anggaran. Bertolak dari kondisi ini, sector publik mulai menerapkan sistem penganggaran yang dapat mengulangi masalah tersebut, yaitu anggaran partisipasi. Melalui system ini, bawahan/pelaksana anggaran dilibatkan dalam penyusunan anggaran yang menyangkut sub bagiannya sehingga tercapainya kesepakatan antara atasan/pemegangkuasa anggaran dan bawahan/pelaksana anggaran mengenai anggaran tersebut.

Peneliti yang menguji pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah telah banyak dilakukan. Suwarno, Dkk (2010) dengan menggunakan variabel pelimpahan wewenang dan motivasi sebagai variabel moderating. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa motivasi dan pelimpahan wewenang tidak memoderasi pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah. Sedangkan menurut Ardiani, dkk (2013) menggunakan variabel pelimpahan wewenang sebagai salah satu variabel moderating. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran yang terdesentralisasi memiliki dampak terhadap peningkatan kinerja manajerial dapat dimulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan yang dimulai dari staf kepada atasan agar lebih optimal.

Variabel kinerja aparatur pemerintah daerah dalam penelitian ini merupakan modifikasi/penyesuaian dari penelitian yang dilakukan Ven (1980) yang awalnya adalah kinerja manajerial. Penyesuaian tersebut didasarkan pada alasan bahwa kinerja aparatur pemerintah daerah dapat dinilai berdasarkan kemampuan aparat tersebut dalam melaksanakan tugas-tugas manajerial yang meliputi perencanaan, investigasi, koordinasi, supervisi, pengaturan staf, negosiasi, dan representasi (Lopez et al, 2007).

Berdasarkan permasalahan dan fenomena di atas penelitian memodifikasi dan menindaklanjuti penelitian Arifin (2012) dengan menambah pelimpahan wewenang sebagai variabel independen dan menghilangkan komitmen organisasi, budaya organisasi, dan gaya kepemimpinan sebagai variabel moderasi. Dipilihnya pelimpahan wewenang sebagai variabel independen karena dengan memiliki tingkat kesadaran bekerja yang tinggi, para aparatur diharapkan memiliki keseriusan ketika berpartisipasi dalam menentukan penyusunan target anggaran dan menyampaikan apa yang seharusnya dicantumkan dalam angka-angka anggaran dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi sektor publik.

Termotivasi penelitian sebelumnya, penelitian ini mengkonfirmasi kembali apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

aparatur pemerintah daerah, dan apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan hal yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah partisipasi penyusunan anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah ?
2. Apakah pelimpahan wewenang mempunyai pengaruh positif dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah?

B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Tinjauan Pustaka

Teori Penetapan Tujuan (*Goal-Setting*)

Teori penetapan tujuan (*goal setting*) dikembangkan oleh Locke pada tahun 1968. Teori penetapan tujuan menjelaskan hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). Konsep dasar teori penetapan tujuan adalah bahwa seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya, penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan meningkatkan prestasi kerja, yang diikuti dengan memiliki kemampuan dan keterampilan. Ada beberapa pernyataan yang berkaitan dengan konsep teori penetapan tujuan, yaitu (1) tujuan yang sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan mudah, (2) tujuan yang jelas (spesifik) dan sulit menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan yang mudah, (3) tujuan yang jelas (spesifik) dan menantang akan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi dari tujuan yang bersifat abstrak. Dalam proses penetapan tujuan, tujuan bisa ditetapkan bersama-sama antara pimpinan dengan bawahan (partisipatif) atau tujuan itu ditetapkan sendiri oleh pimpinan (Gitosudarmo dan Sudita, 1997).

Partisipasi Anggaran

Partisipasi anggaran merupakan suatu proses penyusunan anggaran yang melibatkan karyawan dengan tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Karyawan yang terlibat dalam proses tersebut akan merasa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab atau tugasnya, dibandingkan dengan karyawan yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (*strategic planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu (Indra, 2006). Kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan salah satu yang dapat dipakai untuk dapat meningkatkan efektivitas organisasi.

Kinerja sektor publik merupakan tingkat kecakapan pegawai negeri dalam melaksanakan aktivitas manajemen. Kinerja merupakan salah satu faktor yang dapat dipakai untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Pengukuran kinerja yang handal merupakan salah satu faktor kunci suksesnya organisasi. Penilaian kinerja berguna untuk memperbaiki kinerja masa yang akan datang, memberikan nilai umpan balik tentang kualitas kerja untuk kemudian mempelajari kemajuan perbaikan yang dikehendaki dalam kerja. Kinerja aparat pemerintah dinilai dari berbagai anggota-anggota dalam sektor pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik dengan mendayagunakan sumberdaya yang ada di organisasinya untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Menurut peraturan

pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005, suatu kerja perangkat daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah suatu pengguna anggaran atau barang. Sedangkan kinerja suatu kerja perangkat daerah merupakan pengukuran keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuannya, dan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelayanan yang dicapai.

Pengukuran kinerja sektor publik adalah sistem yang digunakan untuk membantu para manajer publik dalam menilai pencapaian suatu strategi dengan menggunakan alat ukur *finansial* dan *nonfinansial*, selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat dijadikan sebagai pengendalian organisasi karena didalam pengukuran kinerja juga ditetapkan *reward and punishment system* (Wulandari, 2013).

Menurut Indra (2006) indikator pengukuran kinerja adalah kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, 5 komponen yang ada didalam indikator pengukuran kinerja dalam hal ini kinerja pimpinan dalam manajerial/ pimpinan dalam pelaksanaan program SKPD, yaitu:

1. masukan (*inputs*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran
2. keluaran (*outputs*) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan nonfisik
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan fungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung).
4. Manfaat (*benefit*) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan.
5. Dampak (*impacts*) adalah pengaruh yang ditimbulkan baik positif maupun negatif terhadap setiap indikator berdasarkan asumsi yang telah diterapkan.

Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang adalah pemberian wewenang oleh manajer yang lebih tinggi kepada manajer yang lebih rendah untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan otorisasi secara eksplisit dari manajer pemberi wewenang pada waktu wewenang tersebut dilaksanakan (Mulyadi dan Setyawan, 2000). Struktur organisasi yang disertai dengan tingkat pelimpahan wewenang sentralisasi yang tinggi, menunjukkan bahwa semua keputusan yang penting ditentukan pimpinan (manajemen) puncak, sementara manajemen pada tingkat menengah atau bawahannya hanya mempunyai sedikit wewenang didalam pembuatan keputusan. Sebaliknya tingkat pelimpahan wewenang desentralisasi yang tinggi memberikan gambaran bahwa pimpinan puncak mendelegasi wewenang dan pertanggungjawaban pada bawahannya, dan bawahan diberi wewenang untuk membuat berbagai keputusan (Riyadi, 2000).

Pengembangan Hipotesa

Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja aparat pemerintah daerah

Partisipasi anggaran diperkirakan dapat mempengaruhi moral, sikap, motivasi kerja, dan kepuasan kerja (Lopez, 2007), untuk itu agar tujuan anggaran dari suatu organisasi bisa tercapai maka, partisipasi dari bawahan sangat dibutuhkan. Dalam sektor publik pengukuran kinerja tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran, namun pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek yang dapat memberikan informasi yang efektif dan efisien dalam mencapai kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Milani (1975), Brownell dan Hirst (1986) menemukan bahwa terdapat hasil yang tidak signifikan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparat pemerintah daerah. Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti menduga bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparat pemerintah daerah, karena partisipasi yang tinggi yang terdapat dalam diri setiap individu dalam proses penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Dengan adanya partisipasi oleh aparat pemerintah daerah, maka aparat tersebut berusaha untuk bertanggung jawab

terhadap tugas yang dikembannya. Dengan adanya tanggung jawab ini, akan menjadikan kinerja yang baik bagi organisasi pemerintah, sehingga semakin tingginya partisipasi aparat pemerintah daerah akan meningkatkan kinerja di satuan Pemerintah Daerah, sehingga dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H1 :partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja kinerja aparatur pemerintah

Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Pelimpahan wewenang merupakan suatu pemberian yang menjadi hak atas tugas dan tanggung jawab untuk melakukan sesuatu atau memerintahkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Pelimpahan wewenang dalam organisasi juga berkaitan erat dengan struktur organisasi. Struktur organisasi memberikan gambaran mengenai pembagian kekuasaan dalam suatu organisasi. Menurut Gul *et al.* (1995) partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja manajerial akan berpengaruh positif dalam organisasi yang pelimpahan wewenangnya bersifat desentralisasi, dan akan berpengaruh negatif dalam organisasi yang wewenangnya bersifat sentralisasi. Sedangkan Penelitian Handayani (2013) menemukan bahwa desentralisasi tidak mempengaruhi hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja manajerial. Tetapi beda dengan penelitian Choiri (2016) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang memoderasi partisipasi penyusunan anggaran dan kinerja aparatur pemerintah daerah.

Dengan adanya pelimpahan wewenang kepada manajer dalam penyusunan anggaran, maka manajer memiliki tanggungjawab atas setiap keputusan dalam penyusunan anggaran. Maka dengan adanya tanggungjawab atas pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran akan meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka dapat hipotesis yang terbentuk adalah sebagai berikut:

H3: Pelimpahan wewenang dalam partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

C. METODE

PENELITIAN Populasi Dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pemerintah kota Bandar Lampung. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS pemerintah kota Bandar Lampung satuan kerja terdapat 56 SKPD yang terdiri dari Instansi, Badan, Dinas, Kantor Dan Kecamatan. Untuk sampelnya menggunakan *purposive sampling* dimana digunakan sesuai dengan informasi yang akan diambil berdasarkan dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti sebagai berikut :

1. Hasil pajak daerah
2. Retribusi daerah
3. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
5. Belanja Daerah

Pemilihan objek penelitian ini dengan pertimbangan bahwa kota Bandar Lampung merupakan ibu kota provinsi Lampung dan merupakan kota yang telah memperoleh predikat laporang keuangan dengan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tiga tahun berturut-turut.

Jenis Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yaitu yang diperoleh secara langsung dari instansi pemerintah daerah kota Bandarlampung dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden yang menjabat sebagai Sekretaris/setingkat Sekretaris SKPD, Kepala Bidang/setingkat Kepala Bidang, dan Kepala Seksi/setingkat Kepala Seksi yang bertugas di Sekretaris Daerah, Dinas-Dinas, Kantor , Badan, dan Lembaga teknis daerah.

Operasional Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu dua variabel independen dan satu variabel dependen yaitu variabel partisipasi anggaran dan pelimpahan wewenang sebagai variabel independen dan variabel dependennya adalah kinerja aparatur pemerintah daerah.

Skala Pengukuran

Skala pengukuran menggunakan skala Likert (*summated Rating Methods*) yang dinyatakan dengan setuju/ tidak setuju terhadap suatu/ objek atau kejadian tertentu. Masalah ini berupa beberapa alternatif kategori pendapat yang mengukur lebih sensitif dan dapat dinyatakan dengan angka. Jawaban setiap pertanyaan dapat dibagi dalam urutan teratas berdasarkan sikap subjek terhadap objek yang dinyatakan dan opsi jawaban tersebut sebanyak 5 pilihan .

Metode Analisis Data

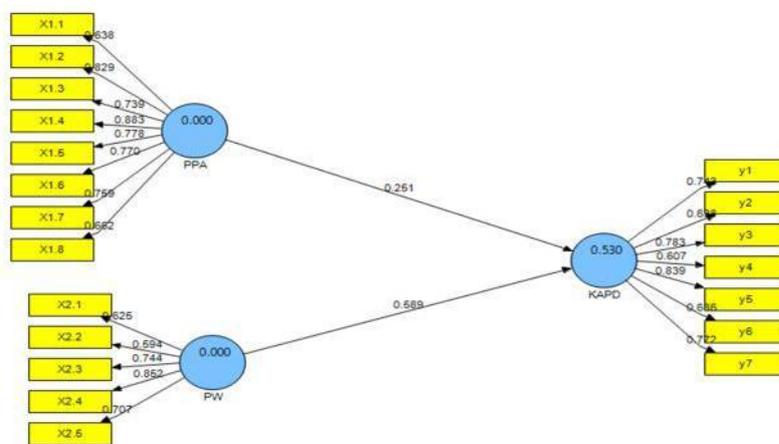
Dalam penelitian ini analisis data menggunakan pendekatan *partial Least Squer* (PLS). PLS merupakan sebuah model persamaan *Structural Equation Modeling* (SEM) yang berbasis komponen atau varians.

Pengukuran Model (*Measurement Model*)

Pengukuran model dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar konsistensi dan keakuratan data yang dikumpulkan. Pengukuran model dalam penelitian ini dilakukan dengan uji validitas yang dilihat dari *convergent validity* dan *discriminant validity* dan uji reabilitas menggunakan *cronbach alpha*.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1 Alogaritma



Pengujian Hipotesis

Dalam pengujian *PLS* secara statistik detiap hubungan yang dihipotesiskan dilakukan dengan menggunakan simulasi. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan prosedur *bootstrapping* dengan 500 kali resampling. Dalam pengujian hepotesis, apabila nilai koefisien *path* yang ditunjukkan oleh nilai statistik T (*T-statistic*) $\geq 1,64$ maka hipotesis alternatif dapat dinyatakan didukung atau diterima, namun apabila nilai statistik T (*T-statistic*) $\leq 1,64$ maka hipotesis alternatif dinyatakan tidak didukung atau tidak diterima. Hasil analisis terhadap pengujian *Path Coefficients* pada *PLS* adalah sebagai berikut:

Pengujian Hepotesis 1 (Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah)

Dari hasil uji *PLS inner model* pada gambar1 diatas menunjukkan pengaruh variabel partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.2512 dengan T sebesar 3.3965. Nilai T hitung 3.3965 lebih besar dari T tabel (1.640) dengan derajat kebebasan 5% atau tingkat probabilitasnya < 0.05 . hasil ini berarti bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah .yang berarti sesuai dengan hepotesis pertama, yaitu partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama didukung, dapat disimpulkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan hubungan antara partisipasi penyusunan anggaran searah dengan kinerja aparatur pemerintah daerah. Semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka kinerja aparatur pemerintah daerah juga akan semakin tinggi.

Hal ini sejalan dengan penelitian Bambang dan Osmad (2007) bahwa adanya partisipasi penyusunan anggaran juga mendorong setiap manajer untuk meningkatkan prestasinya (kinerja) dan bekerja lebih keras karena merasa menganggap bahwa target organisasi dalah merupakan target pribadinya. Hal ini yang mendorong instansi pemerintah untuk terus berkembang dan meningkatkan partisipasi penyusunan anggaran. Hasil penelitian Wulandari (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.

Keikutsertaan berbagai pihak, baik atasan maupun bawahan dalam penyusunan anggaran dapat mendorong moral kerja yang tinggi. Dimana para pegawai akan berusaha menciptakan

anggaran yang sesuai dengan standar atau kondisi yang diinginkan dimasa depan sehingga kinerja suatu organisasi dapat ditingkatkan. Moral kerja yang tinggi dapat mengarahkan seseorang kedalam perilaku yang sesuai dengan tujuan organisasi dan adanya suatu keyakinan dalam diri anggota organisasi bahwa pekerjaan merupakan tanggungjawab yang harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh. Selain itu dengan tingginya partisipasi penyusunan anggaran akan menghasilkan informasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, sehingga komunikasi antara atasan dan bawahan dapat berjalan dengan lancar.

Pengujian Hepotesis 2 (Pengaruh Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah)

Dari hasil uji *PLS inner model* pada gambar 1 diatas menunjukkan pengaruh variabel pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah menunjukkan nilai koefisien jalur sebesar 0.5893 dengan T sebesar 9.4510. Nilai T hitung 9.4510 lebih besar dari T tabel (1.640) dengan derajat kebebasan 5% atau tingkat probabilitasnya < 0.05 . hasil ini berarti bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Yang berarti sesuai dengan hepotesis kedua, yaitu pelimpahan wewenang yang bersifat desentralisasi akan mempunyai pengaruh positif dalam partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah .Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua terdukung.

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Murtanto dan Hapsari (2006) serta bangun(2009) yang membuktikan bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan terhadap penganggaran partisipatif dalam peningkatan kinerja bawahan. Konsisten dengan hasil Penelitian Suetrisno (2010) menyatakan bahwa pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, Pelimpahan dalam organisasi berkaitan dengan struktur organisasi, serta penelitian Ardhani (2013) yang menyatakan desentralisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja anggota, hal ini dapat diartikan jika desentralisasi meningkat maka kinerja anggota meningkat. Artinya, semakin tinggi pengaruh struktur desentralisasi terhadap partisipasi penyusunan anggaran dengan kinerja aparatur pemerintah daerah

E. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah dengan, pada SKPD Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil pengujian hipotesis pertama, menunjukkan interaksi antara partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah. Artinya semakin tinggi tingkat partisipasi penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Wulandari (2013), yang menyatakan bahwa partisipasi penyusunan anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua, Pelimpahan wewenang berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah daerah, artinya pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi suatu organisasi maka kinerja akan semakin tinggi. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suetrisno (2010) yang menyatakan pelimpahan wewenang berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial.

Saran

Berdasarkan simpulan yang diperoleh serta adanya keterbatasan dalam penelitian, sehingga saran-saran yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Populasi dan sampel penelitian pada peneliti selanjutnya diharapkan memperluas populasi dengan menambah pegawai bawahan agar lebih mengetahui bagaimana kinerja aparatur pemerintah daerah secara menyeluruh.
2. Memperbanyak jumlah sampel penelitian dan melakukan wawancara kepada responden.

Implikasi

Studi ini setidaknya diharapkan dapat memberikan masukan kepada SKPD Kota Bandar Lampung bahwa pentingkan adanya partisipasi penyusunan anggaran dan pelimpahan wewenang yang terdesentralisasi sebab pelimpahan wewenang dalam penyusunan anggaran yang terdesentralisasi terhadap kinerja pemerintah Kota Bandar Lampung.

REFERENSI

- Arifin, Solikhun. 2012. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah: Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Pemerintah Kota Semarang). *Skripsi*. Universitas Diponegoro.
- Ardhani, Dian Ayu. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran, Ketidakpastian Lingkungan, Desentralisasi Dan Komite Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Pada DPRD Kabupaten Blora. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi Dian Nuswantoro Semarang.
- Bangun, Andarias (2009). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran, Kejelasan Anggaran Dan Struktur Desentralisasi Terhadap Kinerja Manajerial SKPD Dengan Pengawasan Internal Sebagi Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Deli Semarang). *Tesis*. Program Pasca Sarjana: Universitas Sumatera Utara.
- Brownell, P., and Hirst. 1986. Reliance on Accounting Information, Budgetary Participation, and Task Uncertainty: Tests of A Three-Way Interaction. *Journal of Accounting Research*.
- Choiri, Ananda Miftahul. 2016. Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparatur penerintah daerah: desentralisasi, gaya kepemimpinan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris pada pemerintah daerah kabupaten sukoharjo). *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Dedi Nordiawan, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Gitosudarmo Indriyo dan I Nyoman Sudita, 1997, *Perilaku Keorganisasian*, Yogyakarta: BPFE.
- Gul, Ferdinand A., Tsui, J1udy S.L., Fong, Steve., and Kwok, Helen. 1995. Decentralitation as A Moderating Factor in The Budgetary Participation-Performance Relationship: Some Hongkong Evidence. *Accounting and Business Research, Volume 25, Issue 98*.
- Handayani, Chici. 2013. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Skpd Dengan Desentralisasi Sebagai Variabel Moderating Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang. *Skripsi*. Universitas Negri Padang
- Indra Bastian. 2006. *Akuntansi sektor publik, suatu pengantar*. Jakarta. Erlangga.

- Lopez-Leach, Maria., Stammerjohan William., Mcnair Frances. 2007. Differences in The Role of Job-Relevant Information in The Budget Participation-Performance Relationship Among U.S and Mexican Managers: A Question of Culture for Communication. *Journal of Management Accounting Research Vol.19, Issue 1.*
- Milani, K. 2007. The Relationship of Participation in Budget Setting to Industrial Supervisor Performance and Attitudes: A Field Study. *The Accounting Review.*
- Mulyadi dan Setyawan, Johny. 2000. System perencanaan dan pengendalian manajemen. Edisi Kedua. *Jakarta Salemba Empat.*
- Murtanto dan Hapsari (2006).Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Karakteristik System Informasi Akuntansi Manajemen Sebagai Variabel Moderating.*Jurnal bisnis dan akuntansi, Vol.8, No.1,* hal 1-8.Universitas Trisakti
- Riyadi, Slamet. 2000. Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Sebagai Variabel Moderating Dalam Hubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kinerja Manajerial.*Jurnal riset akuntansi Indonesia.vol.3 no.2.*
- Sukardi.2004. Hubungan Antara Anggaran Partisipatif Dengan Kinerja Manajerial; Peran Motivasi Kerja dan Kultur Organisasional Sebagai Variabel Moderating.”*Jurnal Maksi.* Vol. 4. pp 82-99.
- Sutriesno, 2010. Pengaruh Partisipasi, Motivasi Dan Pelimpahan Wewenang Dalam Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial. *Tesis.* Program Studi Magister Akuntansi.Universitas Diponegoro.
- Suwarno, Kamaliah, Zulbahridar.2010. Pengaruh Partisipasi Dalam Penyusuna Anggaran Terhadap Inerja Manajerialdengan Motivasi Pelimpahan Wewenang Dan Pengetahuan Manajemen Biaya Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah SKPD Se-Provinsi Riau).*Jurnal Sorot.*Vol 8. No 2. Oktober. Hlm 1-190. Lembaga Penelitian Universitas Riau.
- Ven, Van de., 1980. Early Planning, Implementation, and Performance of New Organizations.*The Organizations Life Cycle.*
- Wulandari, Nivo. 2013. Pengaruh Partisipasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang). *Jurnal Akuntansi.* Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

